

SUMBANGAN PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN NGAWI
TAHUN 1995/1996 - 1999/2000

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Oleh

Syaiyuddin Jamil
NIM : 960810101306

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2001

339.41
JAM
4
e
08/10/2001
16236989

JUDUL SKRIPSI

SUMBANGAN PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN NGAWI
TAHUN 1995/1996 - 1999/2000

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : Syaifuddin Jamil

N. I. M. : 960810101306

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

30 Juli 2001

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar **S a r j a n a** dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,



Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes.

NIP. 131 624 478

Sekretaris,



Drs. Zainuri, M.Si.

NIP. 131 832 336

Anggota,

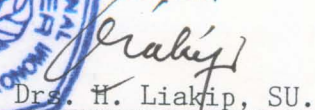


Dra. Nanik Istiyani, M.Si.

NIP. 131 658 376



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Dr. H. Liakip, SU.
NIP. 130 531 976

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Sumbangan Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ngawi Tahun 1995/1996-1999/2000

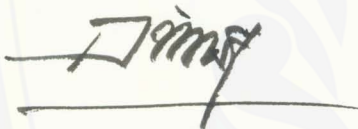
Nama Mahasiswa : Syaifuddin Jamil

N I M : 960810101306

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan

Pembimbing I



Prof. Drs. Kadiman, SU
NIP. 130 261 684

Pembimbing II



Dra. Nanik Istiyani, M.Si
NIP. 131 658 376

Ketua Jurusan



Dra. Aminah, MM
NIP. 130 676 291

Tanggal Persetujuan : 29 Juni 2001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan serangkaian karya ini dengan penuh ketulusan hati teruntuk :

- ◆ Ayahanda dan Ibunda yang ananda hormati dan cintai, yang tiada sunyi akan do'a, sebagai tanda bakti dan terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang tercurah selama ini.
 - ◆ Kakak-kakakku : Mas Aziz, Mas Badroes, Mbak Nira yang selalu memberikan do'a, nasehat dan kasih sayang serta keponakan-keponakanku yang memberikan kerinduan dan keceriaan pada penulis.
 - ◆ Eyang kakung dan putri yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang.
 - ◆ Sumber semangatku, pendukung do'a-do'aku: Mielka dan Micheal Samoa atas segala arti kebersamaannya selama ini.
 - ◆ Almamater yang selalu kujunjung tinggi.
-

MOTTO

“..... Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah : 6-7)

“Barangsiapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, dizalimi lalu memaafkan dan menzalimi lalu beristighfar maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang memperoleh hidayah”

(HR. Al-Baihaqi)

“sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran dalam menilai seseorang, karena rasa sayang dapat menutupi mata untuk melihat cacat dan keburukan sehingga yang tampak hanya bagus dan baiknya saja, sedangkan rasa benci menghalangi mata hati untuk melihat segala kebaikan sehingga yang tampak hanya cacat dan buruknya saja”

(Hamka)

“Percaya kepada kemampuan diri sendiri adalah rahasia kesuksesan dan sendi kebahagiaan juga pintu kemajuan dan keluhuran. Hendaklah engkau berusaha terhadap apa-apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah tolong kepada Allah SWT dan janganlah merasa lemah”

(Al Hadits)

ABSTRAKSI

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat besar dalam komponen Pendapatan asli daerah. Salah satu retribusi daerah yang potensial yang dapat digali dan ditingkatkan adalah retribusi parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pertumbuhan penerimaan retribusi parkir serta prospek penerimaan retribusi parkir dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode deskriptif, dalam hal ini yang dicari adalah mengenai perkembangan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi parkir. Populasi dalam penelitian ini adalah sektor retribusi, khususnya retribusi parkir di Kabupaten Ngawi sejak berdiri hingga sekarang. Sampel yang menjadi objek penelitian ini hanya mencakup periode tahun anggaran 1995/1996-1999/2000.

Metode analisis yang digunakan adalah, untuk mengetahui proporsi sumbangan penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah digunakan analisis proporsi dengan cara membandingkan antara penerimaan retribusi parkir/tahun dengan pendapatan asli daerah/tahun. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan retribusi parkir digunakan analisis pertumbuhan dengan cara membandingkan antara persentase pertambahan penerimaan retribusi parkir tiap tahun dengan jumlah tahun pertambahan. Untuk mengetahui prospek penerimaan retribusi parkir pada kurun waktu 5 tahun mendatang (2000/2001-2004/2005) digunakan analisis trend.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa sumbangan retribusi parkir mempunyai kontribusi rata-rata sebesar 3,87% per tahun. Proporsi ini dapat dikatakan relatif kecil dibandingkan dengan retribusi lain dalam menyumbang pendapatan asli daerah antara lain kontribusi retribusi RSUD dan retribusi pasar memiliki proporsi yang relatif besar. Pertumbuhan rata-rata penerimaan retribusi parkir sebesar 22,52% per tahun. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan dari beberapa sektor retribusi daerah yang lain diantaranya retribusi pasar dan retribusi terminal bus/taxi, pertumbuhan penerimaan retribusi parkir cukup besar. Perkembangan penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan secara riil tiap tahunnya. Pada tahun 2000 diperkirakan sebesar Rp. 178.130.780,07. Tahun 2001 sebesar Rp. 194.161.137 dan sampai dengan tahun 2004 perkembangannya sebesar Rp. 242.252.205,09.

KATA PENGANTAR

Bismillahir rahmaanir rahiim,

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana (S-1) jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulisan Skripsi yang berjudul "Sumbangan Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun 1995/1996-1999/2000" tidak dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan setulus hati penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Drs. Kadiman, SU selaku Dosen Pembimbing I dan Dra. Nanik Istiyani, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan tulus ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan beserta staf administratif.
3. Kepala DISPENDA yang telah memberikan ijin untuk pelaksanaan penelitian.
4. Bapak Bambang S. selaku Kepala DLLAJD Kabupaten Ngawi dan Bapak Martono selaku staf Sub Seksi Perparkiran di DLLAJD Kabupaten Ngawi yang telah membantu dan memberikan data-data kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan SP '96 (Bean, Roni, Riekka, Umi, Rini, Rita, Sutik, Ulum, Kurnia, Dwi, Imam, Cahyo, Yudi, dan sebagainya) atas segala saran, motivasi dan kebersamaan yang telah terbina.
6. Arek-arek Brantas 61 atas persahabatannya selama ini

7. Arek-arek Dawuhan 31 untuk keceriaan, keunikan ,kekeluargaan dan dorongan semangatnya
8. Rekan-rekan di Vixas Computer dan Disbun Computer atas bantuannya.
9. Semua Pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin untuk penulis sebutkan satu per satu.

Penulis hanya berharap semoga bantuan, sumbangan pikiran dan amal saleh serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diterima dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah S.W.T.

Penulis mengharapkan berbagai saran dan kritik yang membangun untuk dapat menyempurnakan hasil penulisan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca dan semua pihak. Amin.

Jember, Juni 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya	7
2.2 Landasan Teori	7
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	19
3.2 Pengambilan dan Sampel	19
3.3 Metode Pengumpulan Data	20

3.4 Metode Analisis Data	20
3.5 Definisi Variabel Operasional	22
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	23
4.2. Analisis dan Pembahasan	33
V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	44
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.	Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Ngawi Tahun 1999 (dalam persen)	23
2.	Perkembangan PDRB Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 1995 / 1996 – 1997 / 1998 Atas Dasar Harga Konstan (dalam rupiah)	24
3.	Peranan Sektoral Dari PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 1995/1996 - 1997/1998 Atas Dasar Harga Konstan (dalam persen)	25
4.	Jumlah Personil Parkir Kabupaten Ngawi Sampai Bulan Desember 2000	29
5.	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ngawi Selama Tahun Anggaran 1995/1996-1999/2000 (dalam unit)	32
6.	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 1995/1996-1999/2000 (dalam rupiah)	34
7.	Proporsi Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Ngawi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 1995/1996-1999/2000 (dalam persen)	36
8.	Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun Empat Sumber Retribusi Daerah di Kabupaten Ngawi (dalam persen)	39
9.	Perbandingan realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Ngawi dengan perhitungan trend tahun 1995/1996-1999/2000(dalam rupiah)	40

DAFTAR BAGAN

Bagan :	Judul	Halaman
1.	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Ngawi	29



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Produk Domestik Regional Bruto Tahun Anggaran 1995/1996-1997/1998	48
2.	Jenis – Jenis Retribusi Daerah di Kabupaten Ngawi serta Perubahan Retribusi daerah Sebagai Dampak Diberlakukannya UU No. 18 / 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah	49
3.	Jumlah Dan Klasifikasi Lokasi Parkir di Kabupaten Ngawi Berdasarkan Yang Mengelola	50
4.	Perhitungan Proporsi Penerimaan Retribusi Parkir Kabupaten Ngawi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 1995/1996-1999/2000 (dalam persen)	51
5.	Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Retribusi Parkir di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 1995/1996 - 1999/2000 (dalam persen)	52
6.	Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Retribusi RSUD di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 1995/1996 - 1999/2000 (dalam persen)	53
7.	Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Retribusi Pasar di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 1995/1996 - 1999/2000 (dalam persen)	54
8.	Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Retribusi Terminal Bus / Taxi di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 1995/1996 - 1999/2000 (dalam Persen)	55
9.	Perhitungan Trend Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2000-2004	56

10. Proporsi Jenis - Jenis Penimaan Retribusi Daerah Terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Ngawi (dalam Persen)	57
11. Proporsi Jenis – Jenis Retribusi Daerah Terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun 1999 / 2000 Sebagai Dampak Diberlakukannya UU No. 18/1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah	58
12. Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Daerah dan Lain - Lain Usaha Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 1995/1996-1999/200 (dalam persen)	59
13. Proporsi Penerimaan Retribusi Daerah, Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 1995/1996-1999/2000 (dalam persen)	60

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat, tertib dan aman. Berdasarkan tujuan tersebut, maka perlu diusahakan terciptanya kondisi nasional yang memberikan rangsangan dan peluang yang seluas-luasnya bagi semua potensi untuk berprestasi dan berpartisipasi. Salah satu potensi pembangunan tersebut adalah peningkatan pembangunan daerah (Dirjen Dikti, 1993:204).

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka kelancaran pelaksanaan proyek-proyek daerah akan memperlancar pula pembangunan nasional. Dengan demikian, maka pembangunan daerah bukan hanya merupakan tujuan pembangunan nasional melainkan juga merupakan alat atau usaha utama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, keadilan sosial, kenaikan tingkat kemakmuran, pembangunan, tingkat pendapatan dan keselarasan serta keserasian pembangunan antar daerah dan golongan.

Dalam usaha melaksanakan pembangunan daerah tidak pula dapat diabaikan aspirasi dan keinginan daerah itu sendiri. Walaupun masing-masing daerah ada persamaan pandangan namun, tidak disangkal kalau antara satu daerah dengan daerah lainnya menghadapi masalah yang berbeda-beda. Persamaan pandangan yang utama adalah keinginan untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam waktu yang secepat-cepatnya. Namun demikian besar keinginan tersebut tidak diimbangi dengan pembiayaan yang cukup besar. Pada sebagian besar propinsi di Indonesia, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan rutin hanyalah

sekitar 25% dari penerimaan rutin daerah, sedang penerimaan pembangunan hanyalah sekitar 10%-15% dari penerimaan pembangunan daerah (Lains, 1985; 6).

Selebihnya adalah subsidi dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan daerah. Kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat digolongkan : (a). sistem dekonsentrasi, (b). sistem desentralisasi, (c). tugas pembantu. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini di sebutkan bahwa :

“Pembangunan daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.” (Pamudji, 1980; 62).

Dalam penjelasan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah juga diberikan penjelasan mengenai arti pentingnya posisi keuangan ini bagi pemerintah daerah yang antara lain berbunyi:

“Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, sumber pendapatan daerah dibedakan antara lain: (1). Hasil pajak daerah, (2). Hasil retribusi daerah; (3). Hasil penerimaan dari laba perusahaan daerah dan (4). Lain-lain usaha daerah yang sah. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk membiayai tugas-tugas pembangunan yang diterapkan setiap tahunnya berdasarkan peraturan daerah di dalam anggaran daerah. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi-potensi/sumber-sumber keuangan harus benar-benar dimanfaatkan dan dikelola seefektif dan seefisien mungkin.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat besar dalam komponen pendapatan asli daerah. Di beberapa Kabupaten jenis penerimaan tersebut memberi kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya suatu daerah, maka semakin banyak fasilitas atau jasa yang disediakan Pemerintah Daerah, sehingga banyak jenis retribusi yang dapat digali dan dipungut oleh Pemerintah Daerah tersebut.

Retribusi adalah salah satu pendapatan yang ikut menentukan usaha pengembangan pendapatan asli daerah. Dari sektor itu diharapkan agar dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah telah mampu membantu memberikan andil atau sumbangan penerimaan dana yang cukup berarti bagi pendapatan daerah. Pungutan retribusi tersebut diantaranya adalah retribusi parkir yang merupakan salah satu pungutan retribusi yang potensial bahkan memberikan pemasukan yang cukup terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya konsumen yang menggunakan alat transportasi baik itu berupa sepeda, sepeda motor, mobil maupun kendaraan yang lain, yang semuanya tidak terlepas dari jasa parkir.

Perkembangan berbagai sarana transportasi yang tersedia di Kabupaten Ngawi yang terus meningkat yaitu pada tahun 1995 jumlah kendaraan bermotor mencapai 16.617 unit kemudian meningkat menjadi 25.401 unit pada tahun 1999. Kenyataan ini telah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi untuk melakukan penataan kembali pusat pertokoan dan perbaikan prasarana transportasi, seperti pelebaran jalan dan penataan lahan parkir. Hal tersebut akan dapat membuka kesempatan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah, sehingga penerimaan retribusi daerah dapat mengalami peningkatan. Salah satu retribusi daerah yang dapat digali dan ditingkatkan dari adanya perkembangan berbagai sarana transportasi dan akses pembangunan adalah retribusi parkir.

Retribusi parkir merupakan sumber pendapatan daerah yang perlu dikelola secara efisien karena penerimaan pendapatan daerah dari jenis retribusi ini sangat elastis terhadap pembangunan daerah. Dampak yang timbul apabila tempat-tempat parkir tersebut dikelola dengan profesional, maka akan dapat memberikan manfaat positif bagi lingkungan sekitar, misalnya memberi kepuasan bagi pengguna jasa parkir, kelancaran lalu-lintas, pencurian kendaraan bermotor lebih sedikit dan memberi kesempatan kerja bagi masyarakat. Disamping itu akan berdampak positif pada keuangan daerah Kabupaten Ngawi, khususnya terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

Perkembangan penerimaan retribusi parkir di kabupaten Ngawi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 1995/1996 penerimaan retribusi parkir sebesar Rp. 78.712.100 dan pada tahun 1999/2000 telah mencapai Rp. 177.337.040. Hal ini berarti mengalami kenaikan 225,29% dibandingkan dengan tahun 1995/1996. Dengan adanya peningkatan penerimaan retribusi parkir tersebut diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, dalam usaha meningkatkan penerimaan retribusi parkir perlu usaha untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada di daerah khususnya Kabupaten Ngawi untuk dijadikan sumber penerimaan retribusi parkir. Sehingga dengan jalan tersebut diharapkan laju penerimaan retribusi parkir dapat mengimbangi besarnya pendapatan asli daerah tiap tahunnya sesuai dengan target yang diharapkan

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Ngawi mengakibatkan berbagai aspek aktifitas kehidupan masyarakat mengalami peningkatan. Pada kenyataannya, adanya peningkatan kegiatan masyarakat dari keberhasilan pembangunan tersebut sangat membutuhkan berbagai sarana dan prasarana guna menunjang mobilitas masyarakat dan melaksanakan aktifitas sehari-hari. Salah satu sarana yang sangat penting tersebut adalah sarana transportasi yang berupa kendaraan bermotor baik

roda dua atau lebih. Dengan demikian kebutuhan terhadap penggunaan kendaraan akan ikut meningkat. Peningkatan penggunaan kendaraan bermotor yang semakin tinggi akan mengakibatkan arus kendaraan bermotor juga ikut meningkat. Demi kelancaran dan ketertiban lalu-lintas, maka membutuhkan prasarana tempat parkir kendaraan. Hal ini akan berpengaruh pada penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Ngawi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan sumbangan penerimaan retribusi parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yaitu:

1. berapa besar proporsi sumbangan penerimaan dari bagian retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi tahun 1995/1996-1999/2000.
2. berapa besar pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Ngawi tahun 1995/1996-1999/2000.
3. bagaimana prospek penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (2000/2001-2004/2005).

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. besarnya kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ngawi selama tahun 1995/1996-1999/2000;
2. pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Ngawi Tahun 1995/1996-1999/2000;
3. prospek penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Ngawi pada lima tahun yang akan datang (2000/2001-2004/2005).

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai:

1. bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan suatu kebijaksanaan terutama yang berkenaan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
2. sumbangan pemikiran penelitian kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Ningrum (1996) dalam penelitiannya berjudul: "Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Menunjang Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang" diperoleh hasil bahwa kontribusi retribusi parkir di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang selama tahun anggaran 1990/1991 sampai dengan 1996/1997 mempunyai kontribusi yang relatif kecil dengan rata-rata sumbangan sebesar 1,75 % per tahun anggaran. Proporsi rata-rata penerimaan retribusi parkir yang rendah ini disebabkan karena kurang intensif dalam melakukan pemungutan, kurang intensif yang dimaksud adalah kurang giat, kurang teliti, kurang teratur serta kurang ketatnya aparat dalam melakukan pemungutan retribusi parkir. Sedangkan Laju pertumbuhan rata-rata penerimaan retribusi parkir yang terjadi dalam tiap tahunnya adalah sebesar 20,82 % per tahun anggaran dan pertumbuhan rata-rata pendapatan asli daerah sebesar 27,95 %. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan dari beberapa sektor retribusi yang lain, pertumbuhan penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan cukup baik, dimana pertumbuhan rata-rata retribusi pasar hanya mencapai sebesar 10,05% per tahun. Dikaitkan dengan penelitian ini, maka akan disesuaikan dengan kondisi dari Kabupaten Ngawi yaitu dalam hal sumbangan penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Keuangan Daerah

Kegiatan pembangunan nasional tidak terlepas dari peran seluruh masyarakat yang ada dan kemampuan daerah dalam pembangunan daerah tersebut. Dalam upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut lebih mandiri untuk membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Kemajuan

daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan pendapatan asli daerah yang positif dari sisi penerimaan dan peranannya dari tahun ke tahun. Pendapatan asli daerah hanya merupakan bagian dari salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan disamping penerimaan lainnya berupa bagi hasil pajak atau bukan pajak, sumbangan dan bantuan serta pinjaman daerah.

Istilah keuangan di sini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah keuangan, antara lain berupa pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan ini penting dalam setiap kegiatan pemerintah, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan... Dan keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Pamudji,1980;62).

Mengenai penerimaan keuangan daerah dapat dikemukakan antara lain sumber-sumbernya sebagai berikut (Tjokroamidjojo,1991;161):

1. dari pendapatan dan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau yang bukan menjadi wewenang pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah;
2. penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah, seperti misalnya retribusi, tarif perijinan tertentu dan lain-lain;
3. pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan perusahaan-perusahaan daerah, yaitu perusahaan-perusahaan yang mendapatkan modal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan daerah;
4. Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, dengan ini dimaksudkan sebagai bagian

- penerimaan tertentu dari pajak-pajak yang dipungut pemerintah pusat dan kemudian diserahkan kepada daerah;
5. pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung, yang penggunaannya ditentukan oleh daerah;
 6. pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang bersifat khusus karena keadaan-keadaan tertentu;
 7. penerimaan-penerimaan daerah yang didapat dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

Hasil-hasil dari penerimaan ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk keperluan pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan dari pemerintah daerah tersebut.

2.2.2. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Maksud dari pada hubungan ini adalah hubungan kerja antara dua pihak, instansi, pejabat dan sebagainya. Jadi maksud kaitan antara pusat dan daerah ialah hubungan atau kaitan tugas atau pertalian antara perangkat pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Adanya pemerintah daerah ini memungkinkan sebagai akibat sistem pemerintah yang disentralisasikan. Dalam hal ini perangkat daerah akan melaksanakan urusan-urusan pusat yang telah diserahkan menjadi urusan daerah sendiri (Irawan, 1990;69).

Hubungan keuangan pusat dan daerah menyangkut pembagian. Hubungan ini menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan itu. Tujuan utama hubungan ini ialah mencapai perimbangan antara berbagai pembagian ini yaitu bagaimana agar antara potensi dan sumber daya masing-masing daerah dapat sesuai. Hubungan keuangan ini mencerminkan tujuan politik uang yang mendasar sekali karena peranannya dalam keseluruhan sistem

pemerintah. Oleh karena itu hubungan ini harus sesuai dengan peranan yang dimainkan pemerintah daerah (Devas, 1988;179).

Ada 4 hal yang perlu diperhatikan suatu sistem hubungan pusat dan daerah harus menjamin adanya (Devas, 1988;22):

- a) suatu pembagian kekuasaan yang rasional tingkat-tingkat pemerintah dalam memungut dan membelanjakan sumber dana pembangunan, yaitu suatu pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi;
- b) suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dan keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- c) pembagian yang ada diantara daerah-daerah atas pengeluaran pemerintah, atau sekurang-kurangnya pembagian yang memang diusahakan akan ke arah itu;
- d) suatu upaya perpajakan di dalam memungut pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan pembagian yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran dalam masyarakat.

2.2.3. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah usaha daerah untuk memperoleh pendapatan atau hasil tetap yang nantinya dimasukkan ke kas daerah yang diatur dalam peraturan daerah (Undang-Undang No.5 tahun 1974 pasal 55), dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai mana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Fauzi dan Iskandar (1989;36): "pendapatan daerah adalah komponen dari pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan dan melancarkan roda pemerintahan. Karena itu, pendapatan daerah dapat dipungut seintensif mungkin."

Dari uraian dan pengertian sumber-sumber pendapatan daerah dapat diartikan bahwa yang di maksud dengan sumber pendapatan daerah adalah dari mana daerah memperoleh pendapatan atau hasil yang

tetap yang menjadi wewenangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai jaminan untuk menutup belanja daerah dalam rangka bagaimana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya sebagai daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam kaitannya dengan pendapatan daerah, sumber-sumber pendapatan daerah lebih ditekankan pada sumber pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakai atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung, khususnya retribusi parkir.

2.2.4. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, bagi pemerintah daerah mutlak diperlukan sumber pembiayaan dalam bentuk uang yang tidak sedikit jumlahnya, untuk menutupi pengeluaran dalam memenuhi kebutuhannya. Pemerintah daerah dalam hal ini harus dapat menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan upaya memperkuat otonomi daerah atau peningkatan pendapatan asli daerah, maka bantuan dari pemerintah pusat sesungguhnya merupakan suatu instrumen yang diharapkan dapat memacu peningkatan pendapatan asli daerah, dan bukan sebaliknya. Hal ini ditekankan oleh Arsyad (1990;44) bahwa hakekat bantuan atau subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah, karena itu daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, adanya kebebasan dalam menggunakan subsidi dari pemerintah pusat

menyebabkan daerah betul-betul dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerahnya.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digunakan oleh daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah menunjukkan kualitas suatu daerah dalam kemandiriannya untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah, berarti pula bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan akan lebih baik, dan semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah, maka bisa dikatakan daerah itu semakin mandiri.

Menurut pasal 3 Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber penerimaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah sendiri yang terdiri atas:
 - 1). hasil pajak daerah,
 - 2). hasil retribusi daerah,
 - 3). hasil perusahaan daerah,
 - 4). lain-lain usaha daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan,
- c. Pinjaman Daerah,
- d. Lain-lain penerimaan yang sah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan yang tidak dapat terlepas dari kenyataan-kenyataan secara potensial yang ada pada daerah yang bersangkutan, juga ditentukan pula oleh kondisi dari daerah tersebut.

2.2.5. Pengertian Retribusi

Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan (secara

ekonomis) dengan suatu jasa balik langsung yang dapat ditunjuk. Pemaksaan pada retribusi bersifat ekonomis, karena siapa saja dapat tidak membayar retribusi dengan tidak atau menolak untuk menikmati jasa balik tersebut (Munawir, 1980;4).

Menurut Brotodiharjo (1984;23) tentang retribusi sebagai berikut: "Pada umumnya hubungan dengan prestasi selanjutnya adalah langsung, pembayaran tersebut ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan prestasi tersebut."

Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh negara (Soemitro,1987;17).

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi adalah:

1. jenis pungutan yang dilakukan pemerintah;
2. dalam pemungutan terdapat unsur paksaan secara ekonomis;
3. adanya kontra prestasi langsung yang diterima oleh wajib bayar;
4. dikenakan kepada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Retribusi mempunyai beberapa asas (Soetrisno,1986; 120) yaitu:

1. Asas Politik Finansial.
 - a. penarikan retribusi hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan yang memadai.
 - b. penarikan retribusi hendaknya bersifat dinamis.
2. Asas Ekonomi.
 - a. pemilihan retribusi yang tepat.
 - b. pemilihan macam-macam penarikan retribusi, mengingat adanya berbagai sektor yang dapat dikenakan pungutan.
3. Asas Keadilan.
 - a. pungutan bersifat umum.
 - b. kesamaan beban.

4. Asas Administratif.

- a. kapasitas penarikan.
- b. keluwesan dalam pemungutan.
- c. ongkos pemungutan diusahakan sekecil mungkin.

a. Retribusi Daerah

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1957 mengenai Peraturan Umum tentang Retribusi Daerah adalah: "Pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran pemakaian atau memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah."

Dalam hubungannya dengan daerah, Wayong (1975;51) dalam bukunya Administrasi Keuangan Daerah mengatakan bahwa: "Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung."

Menurut Departemen Dalam Negeri:

Retribusi Daerah merupakan pembayaran atau karena mendapat atau/mendapat jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan yang pembayarannya dipungut oleh daerah sebagai penyelenggara atau usah yang dapat dianggap sebagai perusahaan. (Depdagri,1981;4).

Melihat beberapa pengertian retribusi daerah dapatlah diambil ciri-ciri pokok retribusi daerah yaitu sebagai berikut:

1. retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah.
2. dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang langsung dapat ditunjuk.
3. retribusi dapat dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah.

b. Kriteria Penerimaan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Retribusi diartikan sebagai suatu pembangunan yang dikaitkan langsung dengan pelayanan dan dikenakan berdasarkan pemikiran bahwa penyediaan pelayanan tertentu tidak mungkin diberikan untuk semua orang dimana keperluan orang berbeda-beda dan menyangkut soal kepemilikan.

Sedangkan penilaian retribusi berdasarkan kriteria umum sebagai berikut (Davey,1989;65):

1. Kriteria kecukupan elastisitas
Retribusi responsif terhadap penambahan penduduk dan kenaikan pendapatan. Retribusi cenderung tidak dapat menyesuaikan dengan inflasi karena adanya kenaikan.
2. Kriteria pemerataan dan keadilan
Retribusi tradisional bersifat regresif.
3. Kriteria kemampuan administrasi
Pemungutan retribusi harus mudah dilaksanakan dan harus efisien, tetapi dalam praktek banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
4. Kriteria penerimaan politik
Retribusi yang menyangkut unsur pilihan tidak begitu sensitif, tetapi untuk kebutuhan politik biasanya sensitif.
5. Kriteria ekonomi
Retribusi merupakan perangkat untuk mengalokasikan sumber daya agar dikelola dengan baik.
6. Kriteria Administrasi Daerah
Retribusi merupakan sumber yang dapat bersifat daerah, jadi secara administrasi daerah lebih tepat, tetapi kesulitan dan hambatannya adalah pada penyesuaian tarif, pengawasan dan sanksi.

Bagi Daerah Tingkat II, retribusi selalu merupakan sumber utama, tingginya pendapatan daerah dari sektor retribusi antara lain disebabkan karena hampir semua retribusi daerah dapat dipungut.

2.2.6. Retribusi Parkir

Obyek retribusi daerah adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dipandang sebagai obyek retribusi daerah. Pungutan yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir tersebut disebut retribusi parkir, sehingga retribusi parkir merupakan bagian dari retribusi daerah.

Retribusi parkir merupakan pajak khusus karena penarikannya bersifat khusus kepada seorang wajib pajak, yaitu pemakai jasa parkir. Disamping itu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah juga bersifat khusus, yakni para wajib pajak yang menikmati fasilitas tempat parkir. Dengan demikian retribusi parkir merupakan sekedar pengganti jasa dari fasilitas tempat parkir yang berupa pelayanan dan kenyamanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam memarkirkan kendaraan kepada pengguna tempat parkir. Istilah sekedar mengandung arti bahwa retribusi parkir tidak ditujukan untuk menutup biaya—biaya yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan pembangunan maupun pemeliharaan tempat parkir. Retribusi parkir juga disebut sebagai retribusi variabel. Hal ini karena dalam menentukan besarnya retribusi parkir tergantung pada jenis kendaraan yang diparkir, misalnya besarnya retribusi parkir sepeda motor berbeda dengan besarnya retribusi parkir truck gandeng, mobil barang dan mobil penumpang.

a. Dasar Hukum Retribusi Daerah dan Retribusi Parkir

Semua pelaksanaan maupun pengelolaan retribusi daerah harus berdasarkan undang-undang, oleh sebab itu pelaksanaan pemungutan retribusi daerah mempunyai dasar hukum. Bagi retribusi daerah dasar

hukum pemungutannya adalah seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 1997 yaitu :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang No.12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa timur.
3. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dasar hukum pemungutan retribusi parkir yang berlaku di Kabupaten Ngawi saat ini adalah Perda No. 17 Tahun 1998 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Perda No. 16 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang merupakan Perubahan dari Perda No. 3 Tahun 1997 Tentang Parkir Kendaraan Dalam Kabupaten Ngawi.

b. Subyek dan Obyek Retribusi Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Ngawi yaitu Perda No. 17 Tahun 1998 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum disebutkan subyek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah orang atau pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi dapat dikenakan retribusi parkir di tepi jalan umum, sedangkan obyek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah setiap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah berupa jasa pelayanan dan pemanfaatan parkir di tepi jalan umum.

Didalam Perda No. 16 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir disebutkan subyek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi dapat dikenakan retribusi tempat khusus parkir, sedangkan obyek retribusi tempat khusus parkir meliputi :

- (a) parkir di lingkungan Pasar Daerah;

- (b) parkir di lingkungan Pasar Hewan;
- (c) tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Istilah parkir sendiri mempunyai arti sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Parkir di tepi jalan umum adalah parkir ditepi-tepi jalan yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan mempunyai sarana parkir serta dipergunakan untuk pemberian pelayanan. Sedangkan tempat khusus parkir adalah tempat parkir kendaraan yang dikelola dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.



III. METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di Kabupaten Ngawi ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk mencari kecenderungan-kecenderungan dengan menggunakan analisa pemusatan basis, median, modus atau penyebaran. Dalam hal ini yang dicari adalah mengenai perkembangan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi parkir.

3.1.2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah tentang pendapatan asli daerah, dalam hal ini adalah penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi parkir.

3.1.3. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah retribusi, khususnya retribusi parkir di Kabupaten Ngawi. Secara teoritis yang menjadi populasi adalah retribusi parkir di Kabupaten Ngawi sejak berdiri hingga sekarang.

3.2. Pengambilan Sampel

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini hanya mencakup periode tahun 1995/1996-1999/2000, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *time series*. Alasan menggunakan tahun tersebut adalah karena pada kurun waktu tersebut perekonomian Indonesia mengalami dua situasi yang saling berlawanan yakni kondisi normal dan kondisi krisis, sehingga kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap jalannya perekonomian di Kabupaten Ngawi.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data-data yang digunakan adalah data skunder tentang penerimaan retribusi parkir dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ngawi tahun anggaran 1995/1996-1999/2000. Data-data tersebut diperoleh dari kantor-kantor instansi yang terdapat di wilayah Kabupaten Ngawi, Seperti: Dinas Pendapatan Daerah/ Bagian Keuangan (DISPENDA), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah (DLLAJD), Dinas Pasar, dan Biro Pusat Statistik (BPS).

3.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini hanya bisa menjelaskan dan menggambarkan kenyataan yang ada. Ada tiga macam analisis yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Analisis Proporsi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan penerimaan retribusi parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ngawi selama tahun anggaran 1995/1996-1999/2000 digunakan rumus proporsi (Djarwanto, 1982;129):

$$P_i = \frac{Y_i}{X_i} \times 100\%$$

Keterangan:

P_i = Nilai Proporsi (%)

Y_i = Nilai penerimaan retribusi parkir (tiap tahun)

X_i = Nilai pendapatan asli daerah (tiap tahun)

2. Analisis Pertumbuhan

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Ngawi selama tahun 1995/1996 – 1999/2000 digunakan rumus (Dayan, 1985;154):

$$\text{Log } G_m = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Log } X_i}{n}$$

Keterangan:

G_m = Pertambahan rata-rata penerimaan retribusi parkir

X_i = Persentase pertambahan penerimaan retribusi parkir (tiap tahun)

n = Jumlah tahun pertambahan

3. Analisis Trend

Analisis ini digunakan untuk mengetahui prospek penerimaan retribusi parkir pada kurun waktu 5 tahun mendatang (Dayan, 1985;303):

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y' = Nilai trend penerimaan periode yang ditaksir

a = Nilai trend penerimaan retribusi parkir periode dasar

b = Nilai trend perubahan peningkatan retribusi parkir (tiap tahun)

X = Jumlah unit tahun yang dihitung

Untuk mencari nilai a dan b dengan cara sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan:

Y = Jumlah penerimaan retribusi tiap tahun

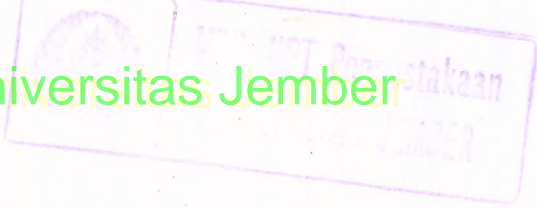
n = Jangka waktu penilaian

X = Skala waktu

3.5. Definisi Variabel Operasional

Batasan-batasan supaya tidak terjadi kekaburan arti dan tujuan penelitian yang salah dari tema pokok penelitian antara lain:

- a. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi sehubungan dengan suatu jasa akan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada masyarakat.
- b. Penerimaan retribusi parkir adalah seluruh penerimaan yang berasal dari pungutan jasa parkir yang diterima oleh pemerintah daerah (rupiah/tahun).
- c. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah di Kabupaten Ngawi yang berasal dari sumber-sumber daerah itu sendiri. Sumber-sumber daerah yang dimaksud adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan lain-lain usaha daerah yang sah (rupiah/tahun).



IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis

Kabupaten Ngawi merupakan daerah yang berada dibagian paling barat dari wilayah Propinsi Jawa Timur, yang berbatasan dengan wilayah Propinsi Jawa Tengah. Dilihat dari letak geografisnya Kabupaten Ngawi terletak pada koordinat 7° 21' sampai dengan 7° 31' Lintang Selatan (LS) dan 111°10' sampai dengan 111°40' Bujur Timur (BT). Dan terletak pada ketinggian antara 25 meter sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut.

Secara administratif, luas wilayah Kabupaten Ngawi per kecamatan dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1: Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Ngawi Tahun 1999 (dalam persen)

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	%
1.	Sine	80,22	6.19
2.	Ngrambe	57,49	4.44
3.	Jogoorogo	65,84	5.08
4.	Kendal	84,56	6.52
5.	Geneng	87,04	6.71
6.	Kwadungan	30,30	2.34
7.	Pangkur	29,41	2.27
8.	Karangjati	66,67	5.14
9.	Bringin	62,62	4.83
10.	Padas	81,71	6.30
11.	Ngawi	70,56	5.44
12.	Paron	101,14	7.80
13.	Kedunggalar	129,65	10.04
14.	Pitu	56,01	4.32
15.	Widodaren	88,43	6.82
16.	Mantingan	57,19	4.41
17.	Karanganyar	147,14	11.35
Jumlah		1295,98	100.00

Sumber data: BPS Kabupaten Ngawi, Maret 2001

Berdasarkan tabel 1 tersebut, wilayah Administratif Kabupaten Ngawi yang mempunyai luas 129.589,51 Ha / 1.295,95 Km² terbagi dalam

4 wilayah kerja Pembantu Bupati dan 17 wilayah kecamatan, terdiri dari 4 kelurahan dan 211 desa.

4.1.2. Keadaan Ekonomi

Sebagai gambaran keadaan ekonomi di Kabupaten Ngawi dapat ditunjukkan dengan perkembangan produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yaitu nilai dari pada barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Perkembangan PDRB di Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2: Perkembangan PDRB Kabupaten Ngawi Tahun 1995-1997 Atas Dasar Harga Konstan (dalam rupiah)

No.	Tahun Anggaran	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Jutaan Rupiah)	PDRB Atas Dasar Berlaku (Jutaan Rupiah)
1.	1995/1996	637.721,27	751.499,09
2.	1996/1997	681.733,43	857.002,58
3.	1997/1998	708.757,44	971.810,69

Sumber data: Bappeda Kabupaten Ngawi, Maret 2001

Seperti terlihat pada tabel 2, PDRB Kabupaten Ngawi mengalami perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun selama tahun 1995/1996-1997/1998. Pada tahun 1995/1996 PDRB berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 637.721,27 juta, kemudian meningkat menjadi Rp. 708.757,44 juta pada akhir tahun 1997. PDRB berdasarkan harga yang berlaku pada tahun 1995/1996-1997/1998 juga mengalami perkembangan, pada tahun 1995/1996 sebesar Rp. 751.499,09 dan pada tahun 1997/1998 meningkat menjadi Rp. 971.810,69 juta. Untuk melihat lebih jauh dari pada keadaan ekonomi Kabupaten Ngawi dapat ditunjukkan dengan distribusi PDRB menurut lapangan usaha yang dapat di lihat pada tabel 3 dan pada lampiran 1.

Tabel 3: Peranan Sektoral dari PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ngawi Tahun 1995/1996-1997/1998 Atas Dasar Harga Konstan (dalam persen)

Lapangan Usaha	Tahun		
	1995	1996	1997
Pertanian	42,35	40,01	40,03
Pertambangan dan Penggalian	0,49	0,48	0,50
Industri Pengolahan	6,07	6,30	5,74
Listrik, Gas dan Air minum	0,49	0,55	0,73
Konstruksi	7,12	8,68	7,80
Perdagangan, hotel, dan restoran	24,42	25,08	26,52
Pengangkutan dan Komunikasi	3,08	3,18	3,11
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	4,95	4,92	4,90
Jasa-jasa	11,03	10,80	10,67
Jumlah PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber data: Bappeda Kabupaten Ngawi, Maret 2001

Seperti terlihat pada tabel 3, selama tahun 1995-1997 distribusi PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Ngawi yang terbesar terdapat pada lapangan usaha di bidang pertanian yaitu sebesar 40,01% sampai dengan 42,35%. Hal ini mudah dipahami karena di Kabupaten Ngawi banyak terdapat lahan pertanian dan merupakan daerah agraris yang sangat subur. Bila dilihat dari besarnya PDRB menurut lapangan usaha, maka terdapat perkembangan yang meningkat dari lapangan usaha pertanian. Pada tahun 1995 PDRB di bidang pertanian atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 323.108,07 kemudian meningkat menjadi Rp.397.735,25 tahun 1997. Untuk distribusi PDRB atas dasar harga berlaku terkecil terdapat pada lapangan usaha bidang pertambangan dan penggalian yaitu sebesar Rp. 3.305,30 pada tahun 1995 dan meningkat menjadi Rp. 5.734,32 pada tahun 1997. Hal ini disebabkan karena bidang ini belum mampu dikelola secara lebih maksimal, disamping itu jumlahnya yang masih terbatas. Meskipun distribusi PDRB lapangan usaha pertambangan dan penggalian relatif kecil, tetapi selama tahun 1995-1997 menunjukkan perkembangan yang meningkat setiap tahunnya.

Gambaran lain keadaan ekonomi di Kabupaten Ngawi dapat ditunjukkan dengan pendapatan regional dan angka-angka per kapita yang meliputi PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita.

Pendapatan regional per kapita merupakan pendapatann rata-rata dari penduduk suatu daerah selama jangka waktu satu tahun. Sedangkan PDRB per kapita merupakan nilai produksi rata-rata dari penduduk dari barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu daerah selama jangka waktu satu tahun. Seperti yang tercantum pada lampiran 1, pendapatan regional Kabupaten Ngawi selama tahun 1995-1997 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 1995 pendapatan regional sebesar Rp. 707.611,42 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 913.529,73 juta pada tahun 1997. Peningkatan pendapatan regional per kapita dan PDRB per kapita dalam jangka waktu yang sama. Pada tahun 1995 pendapatan regional per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp.. 844.091,78 kemudian meningkat menjadi Rp. 1.081.660,94 pada tahun 1997. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 1995 sebesar Rp. 896.444,27 kemudian meningkat menjadi Rp. 1.150.668,26 pada tahun 1997.

Secara keseluruhan, dengan melihat posisi PDRB, Pendapatan Regional, PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita masing-masing perkembangannya selama tahun 1995-1997, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan ekonomi di Kabupaten Ngawi cukup baik, berdasarkan kenyataan ini maka potensi-potensi ekonomi yang ada perlu dipertahankan dan terus dikembangkan sebagai wujud dari perekonomian daerah yang dinamis.

4.1.3. Retribusi Daerah di Kabupaten Ngawi

Dalam pasal 8 UU No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah disebutkan adanya 6 jenis retribusi yang dapat di pungut daerah yaitu uang leges, uang tol / bea jalan, bea pangkalan dan bea penambangan, bea pembatalan dan pemeriksaan, uang sempadan dan ijin bangunan, retribusi atas pemakaian tanah dan bea pengukuran.

Dalam perkembangannya, jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Ngawi berjumlah 33 pos

penerimaan retribusi daerah yang masing-masing didukung dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973/2472/PUOD Perihal Perda Dati I/Dati II tentang Pajak dan Retribusi, maka ditetapkan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai perubahan dari UU No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan UU No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi. Sebagai dampak diberlakukannya UU NO. 18 Tahun 1997 ini, terjadi perubahan pada jenis retribusi daerah di Kabupaten Ngawi. Dari 33 jenis retribusi daerah berubah menjadi 16 jenis retribusi daerah dengan ketentuan 33 jenis retribusi daerah tersebut masih ada yang tetap berlaku, diganti dan dihapus, sedangkan batas/tenggang waktu penyesuaian terhadap UU NO. 18 Tahun 1997 adalah 1 hingga 5 tahun. Mengenai jenis retribusi daerah Kabupaten Ngawi dan perubahannya sebagai dampak diberlakukannya UU No. 18 Tahun 1997 dapat dilihat pada lampiran 2.

4.1.4. Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Ngawi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ngawi No. 011/3328/402.31/1974, maka penyelenggaraan perparkiran kendaraan di Kabupaten Ngawi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Ngawi. Pihak Dispenda menunjuk Unit Pelaksana Teknis Daerah ((UPTD) sebagai pelaksana perparkiran kendaraan. Unit Pelaksana Teknis Daerah ini yang bertugas mengkoordinir para juru parkir untuk memunggut retribusi parkir.

Sejalan dengan perkembangan sarana transportasi dan agar pengelolaan parkir kendaraan berjalan lebih efisien serta dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir, maka pada tanggal 5 April 1997 Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ngawi mengeluarkan Surat Keputusan No. 188.342/0190/415.013/1997 tentang Penyerahan Tugas Sebagai Koordinator Pemrosesan Izin /urusan parkir. Sejak saat itu

penyelenggaraan parkir kendaraan dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah (DLLAJD) Kabupaten Ngawi. Dalam melaksanakan tugas yang bersifat teknis/operasional mengenai perparkiran, DLLAJD Kabupaten Ngawi menunjuk secara khusus sub seksi perparkiran.

Sub seksi perparkiran bertugas menyiapkan perencanaan penunjukkan lokasi, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan tempat parkir dan jembatan penyeberangan serta pengendalian ketertiban parkir kendaraan. Di samping hal tersebut, tugas sub seksi perparkiran adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. menyusun laporan kegiatan perparkiran kendaraan..
3. melaksanakan penilaian dan pembinaan unntuk pemberian izin lokasi parkir.

Secara teknis pelaksanaan lapangan sub seksi perparkiran menugaskan juru parkir sebagai pemungut retribusi parkir. Para juru parkir ini yang akan mengatur ketertiban parkir kendaraan dan memberi pelayanan kepada pengguna jasa parkir. Di samping hal tersebut, juru parkir juga bertugas menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di sekitar area parkir. Tugas tersebut dilaksanakan setiap hari mulai jam 06.00 – 22.00. Apabila seorang juru parkir beristirahat, maka juru parkir yang lain akan menggantikan tugasnya di area parkir yang ditinggalkannya. Untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh juru parkir, sub seksi perparkiran mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas juru parkir. Pengawasan tersebut meliputi tata cara, pelayanan, pelaksanaan tugas dan keteraturan parkir kendaraan. Pada akhir tahun 2000/2001 jumlah personel yang mengurus perparkiran kendaraan dapat dilihat pada tabel 4.

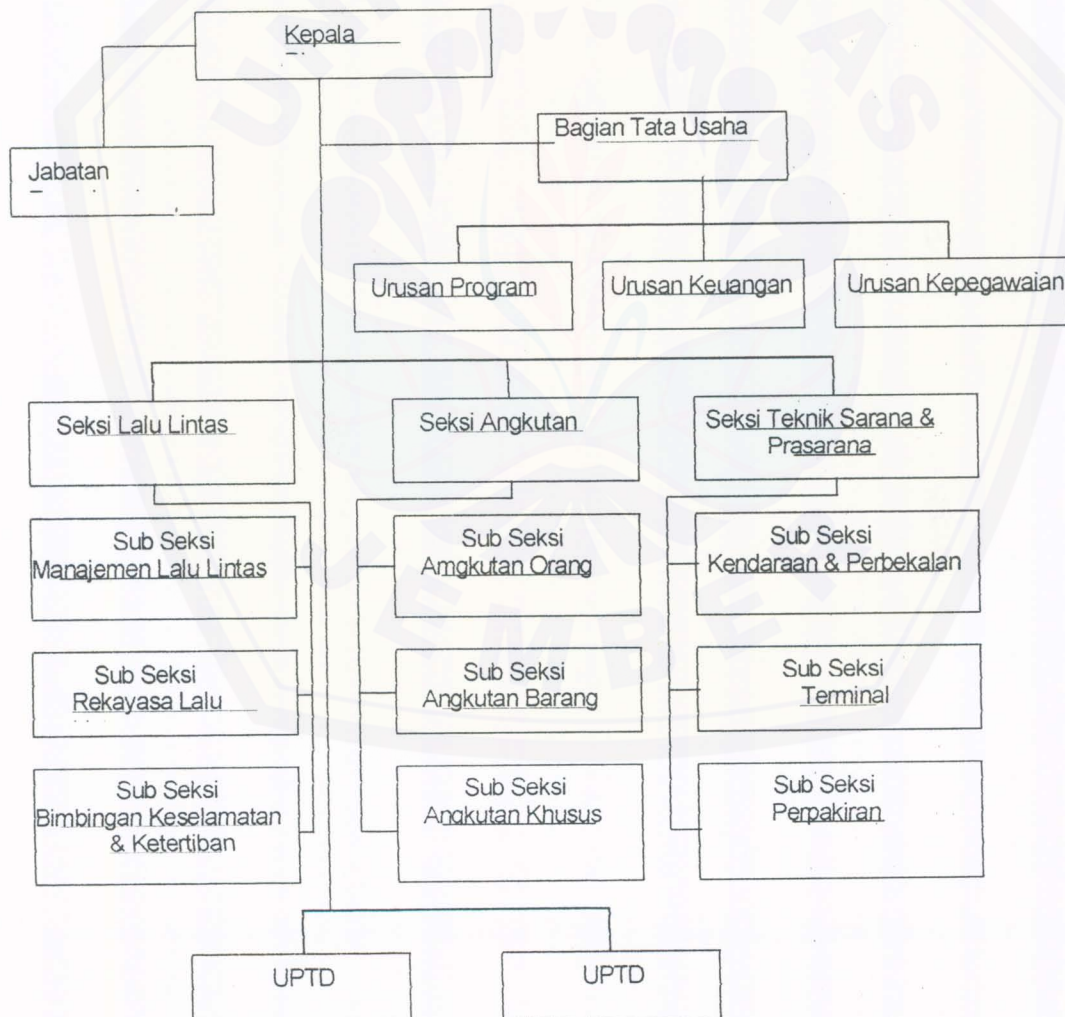
Tabel 4: Jumlah Personel Parkir Kabupaten Ngawi Sampai Bulan Desember 2000

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Ka. Sub Seksi Perparkiran	1
2.	Staf Parkir	4
3.	Keamanan/Pengawas Parkir	4
4.	Juru Parkir	68

Sumber data: DLLAJD Kabupaten Ngawi, Maret 2001

Mengenai susunan organisasi dan tata kerja DLLAJD dapat di lihat pada bagan I.

Bagan 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Ngawi



Sumber: Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Ngawi

Penyelenggaraan parkir kendaraan yang dilaksanakan oleh DLLAJD Kabupaten Ngawi, meliputi 3 jenis tempat parkir, yaitu:

1. Tempat Parkir Umum

Adalah tempat parkir jalan kabupaten dan tempat-tempat tertentu dalam Kabupaten Ngawi.

2. Tempat Parkir Khusus

Adalah tempat parkir kendaraan yang ditunjuk dan ditetapkan secara khusus oleh Bupati Kepala daerah.

3. Tempat Parkir Swasta

Adalah tempat parkir yang penanganannya diserahkan kepada para parkir swasta sedangkan pengelolaan administrasi pembukuaannya tetap oleh Sub Seksi Perparkiran, dimana pembagian hasil 30% untuk para parkir swasta dan 70% untuk Dinas.

Dengan ditetapkannya UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah N0. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka perlu mengatur ketentuan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir dengan menetapkannya dalam peraturan daerah. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka penyelenggaraan retribusi parkir di Kabupaten Ngawi tidak hanya di kelola oleh DLLAJD, namun juga di kelola oleh dinas lain, salah satunya adalah Dinas Pasar. Berdasarkan PERDA No. 17 Tahun 1998 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh DLLAJD, sedangkan PERDA No. 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Khusus, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Dinas Pasar.

4.1.5. Ketentuan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Ngawi

Besarnya tarif retribusi parkir selama tahun 1974 sampai sekarang telah mengalami beberapa perubahan yang diatur di dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang berlaku saat ini adalah Peraturan Daerah No. 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum dan

Peraturan Daerah No. 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Mengenai besarnya tarif masing-masing Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah No. 17 Tahun 1998 (DLLAJD)

Pungutan retribusi parkir untuk setiap kali parkir per jenis kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

- a. truck gandeng dan atau trailer sebesar Rp. 1000,-
- b. bus, truck mobil barang lainnya yang sejenis sebesar Rp. 7.00,-
- c. sedan, MPU dan kendaraan lainnya yang sejenis sebesar Rp. 300,-
- d. sepeda motor sebesar Rp. 200,-
- e. sepeda sebesar Rp. 100,-

2. Peraturan Daerah No.16 Tahun 1998 (Dinas Pasar)

Pungutan retribusi parkir untuk setiap kali parkir per jenis kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

- a. truck gandeng atau trailer sebesar Rp. 1.500,-
- f. bus, truck mobil barang lainnya yang sejenis sebesar Rp. 1.000,-
- g. sedan, MPU dan kendaraan lainnya yang sejenis sebesar Rp. 500,-
- h. sepeda motor sebesar Rp. 300,-
- i. sepeda sebesar Rp. 100,-

4.1.6. Sarana Transportasi

Perkembangan perekonomian masyarakat erat sekali dengan kemajuan sarana transportasi yang tersedia di masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap perbaikan sarana transportasi akan cenderung mendorong pembangunan ekonomi, misalnya kelancaran kegiatan perdagangan, perindustrian, dan pertanian sangat tergantung pada jumlah dan jenis transportasi yang digunakan. Sarana transportasi yang banyak digunakan masyarakat Ngawi adalah kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Jumlah kendaraan

menurut jenis kendaraan di Kabupaten Ngawi selama tahun 1995 – 1999 dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5: Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ngawi Selama Tahun 1995-1999 (dalam unit)

Tahun	Bus	Truck	Colt	Sedan/ jeep	Sepeda Motor
1995	35	480	1083	152	14867
1996	38	493	1100	198	15709
1997	36	482	1136	264	16466
1998	44	486	1234	270	18802
1999	37	562	1547	389	22866

Sumber data: BPS Kabupaten Ngawi, Maret 2001

Tabel 5 menunjukkan selama tahun 1995 – 1999 jumlah bus dan truck berfluktuasi. Pada tahun 1997 dan 1999 jumlah bus mengalami penurunan, tahun 1997 berjumlah 36 dan tahun 1999 berjumlah 37. Ini berarti terdapat penurunan pada tahun 1997 sejumlah 2 unit dan tahun 1999 sejumlah 7 unit dibandingkan jumlah bus tahun sebelumnya. Tahun 1997 jumlah truck juga mengalami penurunan sejumlah 11 unit dibandingkan jumlah truck tahun 1996. Sedangkan jumlah kendaraan colt, sedan/jeep dan sepeda motor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 1999 colt berjumlah 1547 unit, sedan/jeep berjumlah 389 unit dan sepeda motor berjumlah 22.866 unit. Ini berarti terdapat peningkatan sejumlah 313 unit colt, 119 unit sedan/jeep dan 40064 unit sepeda motor dibandingkan jumlahnya pada tahun 1998.

4.2 Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Analisis

Peranan pemerintah di negara-negara sedang berkembang pada umumnya jauh lebih penting dalam pembangunan dibandingkan dengan negara-negara yang telah maju. Fungsi pemerintah tidak hanya terbatas pada penyediaan barang-barang dan jasa kolektif tetapi juga berfungsi untuk menciptakan iklim yang sehat bagi kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bersama dan dalam mencapai kesejahteraan tersebut dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, sebagai salah satu aspek kebijaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang perlu dilakukan usaha-usaha menggali sumber-sumber ekonomi yang telah ada untuk pembangunan.

Pembangunan adalah suatu proses yang menyangkut perbaikan, jadi pembangunan merupakan masalah yang bersifat multisektoral. Ini berarti pula masalah yang dihadapi dalam pembangunan sangat kompleks. Seiring dengan laju pembangunan yang terus meningkat, salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah pendanaan. Walaupun penerimaan dalam negeri meningkat terus, namun biaya rutin juga ikut meningkat dari tahun ke tahun, yang disebabkan semakin bertambahnya pengeluaran pembangunan. Hal ini mengakibatkan penerimaan pemerintah untuk membiayai pembangunan yang sesuai dengan prioritas sektoral dalam Repelita selalu saja tidak dapat memenuhi anggaran pembangunan setiap tahunnya. Agar dapat mengatasi kekurangan dana pembangunan yang dihadapi, pemerintah senantiasa menjajaki kemungkinan untuk dapat mencari kekurangan dana pembangunan tersebut, yaitu berusaha meningkatkan kemampuan sumber dana dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan nasional. Peningkatan sumber dana dalam negeri tersebut salah satunya berupa peningkatan penerimaan daerah.

Penerimaan daerah atau pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan

dan bantuan. Penerimaan pembangunan terdiri atas pinjaman pemerintah daerah dan pinjaman dari BUMN. Sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Ngawi yang terbesar adalah dari sektor retribusi daerah. Pendapatan asli daerah dari retribusi pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan secara riil. Dari 33 jenis retribusi daerah yang ada di Kabupaten Ngawi, retribusi parkir merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Retribusi parkir merupakan bagian dari retribusi daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menyumbang pendapatan asli daerah dibandingkan dengan retribusi daerah yang lain. Berdasarkan hal ini, maka perlu kiranya mengetahui perkiraan-perkiraan penerimaan dari retribusi parkir di Kabupaten Ngawi dengan menganalisis perkembangan penerimaan dari bagian retribusi parkir yang hasilnya nanti diharapkan dapat dipakai sebagai masukan bagi Pemerintah Ngawi dalam mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk mengupayakan peningkatan penerimaan pendapatan dari sektor retribusi parkir.

Sebelum menganalisis perkembangan penerimaan retribusi di Kabupaten Ngawi selama tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000, maka akan ditunjukkan target dan realisasi penerimaan dari retribusi parkir di Kabupaten Ngawi pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6: Target dan Realisasi Penerimaan dari Retribusi Parkir di Kabupaten Ngawi Tahun Anggran 1995/1996 -1999/2000

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase (%)
1995/1996	90.465.000	78.712.100	87,01
1996/1997	100.000.000	102.944.600	102,94
1997/1998	110.000.000	116.830.250	106,21
1998/1999	160.000.000	168.454.090	105,28
1999/2000	175.032.000	177.337.040	101,32

Sumber data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi, Maret 2001

Pada tabel 6 terlihat bahwa target penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Ngawi menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Perbandingan antara target dan realisasi tiap tahunnya mengalami peningkatan, laju pertumbuhan rata-ratanya sebesar 0,55% per tahun. Prosentase realisasi terbesar terjadi pada tahun 1997/1998 yaitu sebesar 106,21%. Pada tahun anggaran 1995/1996 prosentase penerimaan retribusi parkir sebesar 87,01%, berarti terjadi penurunan sebesar 12,99% dari target tahun 1995/1996. Penurunan prosentase realisasi ini disebabkan karena terbatasnya jumlah karyawan, sehingga untuk petugas dinas luar masih belum memenuhi kebutuhan sedangkan potensi yang dapat di gali cukup banyak. Hal ini menyebabkan target tidak dapat dicapai. Sampai dengan tahun 1997/1998 prosentase realisasi penerimaan retribusi parkir mencapai 106,21%. Ini merupakan prosentase realisasi terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 1996/1997 hanya mencapai 102,94%. Kemudian pada tahun 1998/1999 dan tahun 1999/2000 mengalami penurunan, prosentase realisasinya sebesar 105,28% dan 101,32%. Penurunan tersebut disebabkan karena terlalu tinggi target tanpa melihat kondisi yang ada.

a. Sumbangan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi

Pendapatan yang ideal adalah sumber pendapatan yang bersifat ajeg dan selalu mengalami kenaikan. Ajeg dalam arti selalu dapat diharapkan masuk dalam kas daerah atau negara. Retribusi parkir sebagai salah satu dari sekian banyak sumber pendapatan asli daerah kiranya sudah dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan yang ideal bagi pemerintah daerah.

Proporsi atau besarnya sumbangan retribusi parkir di Kabupaten Ngawi dapat diketahui dengan cara membandingkan antara jumlah penerimaan retribusi parkir dengan pendapatan asli daerah dikalikan 100%. Dalam analisis proporsi ini dimaksudkan

untuk mengetahui komposisi penerimaan retribusi parkir dalam menunjang keuangan daerah secara proporsional. Besarnya sumbangan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dapat di lihat pada tabel 7 Berikut ini:

Tabel 7: Proporsi Penerimaan Retribusi Parkir Kabupaten Ngawi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 1995/1996 – 1999/2000 (dalam persen)

Tahun	Jumlah Penerimaan Retribusi Parkir = Y_1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah = X_1	Proporsi (%)
1995/1996	78.712.100	2.770.747.489,55	2,84
1996/1997	102.944.600	2.807.893.111,39	3,67
1997/1998	116.830.250	3.429.841.254,50	3,41
1998/1999	168.454.090	3.639.549.142,70	4,63
1999/2000	177.337.040	3.690.346.351,00	4,81
Proporsi rata-rata			3,87

Sumber data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi, Maret 2001

Berdasarkan data tabel 7 dapat diuraikan bahwa proporsi dan sumbangan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan prosentase. Sumbangan pada tahun 1995/1996 dapat dikatakan cukup rendah yaitu sebesar 2,84%. Hal-hal yang menyebabkan rendahnya prosentase sumbangan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah tersebut antara lain:

- (1). kurangnya mutu pelayanan dan administrasi retribusi parkir yang belum tertib.
- (2). kurang dekatnya hubungan antara pemungut dengan pengguna jasa serta kurang ahlinya tenaga pemungut retribusi dapat mengakibatkan kurang efektifnya pemungutan..
- (3). semakin besar pendapatan asli daerah setiap tahun anggaran dan tidak diikuti laju penerimaan retribusi parkir yang tinggi mengakibatkan proporsi kecil.

Pada tahun 1997/1998 prosentase sumbangan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah sebesar 3,41% mengalami penurunan

dari tahun 1996/1997 yang mencapai 3,67%. Penurunan ini disebabkan karena dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Ngawi Nomor: 342/0190/415.013/1997 tentang Penyerahan tugas/wewenang dari DISPENDA kepada DLLAJD sebagai Koordinator Pemrosesan Izin/Penyelenggaraan Urusan Parkir. Dengan adanya penyerahan tugas tersebut, mengakibatkan kinerja DLLAJD sebagai pengelola perpajakan belum mampu melaksanakan tugasnya secara lebih optimal, sehingga prosentase sumbangan pada tahun 1997/1998 mengalami penurunan.

Tahun anggaran 1999/2000 penerimaan retribusi parkir memberikan sumbangan terbesar terhadap pendapat asli daerah yaitu 4,81%. Besarnya proporsi pada tahun 1999/2000 disebabkan karena diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, sehingga perlu mengatur ketentuan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir dengan menetapkannya dalam Perda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka penyelenggaraan parkir di Kabupaten Ngawi dikelola oleh 2 instansi yaitu DLLAJD dan Dinas Pasar yang masing-masing ditetapkan dalam Perda. Hal ini mengakibatkan realisasi penerimaan retribusi parkir yang dicapai dapat lebih besar dan dapat mengimbangi besarnya pendapatan asli daerah setiap tahunnya.

Proporsi rata-rata penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah adalah 3,87%. Proporsinya sebesar 3,87% tersebut dapat dikatakan rendah bila dibandingkan dengan retribusi lainnya. Proporsi rata-rata retribusi RSUD sebesar 8,77% dan Pasar Daerah sebesar 11,08%. Namun secara riil penerimaan retribusi parkir meningkat setiap tahunnya.

Retribusi Daerah itu sendiri mempunyai proporsi rata-rata penerimaan tertinggi dibandingkan dengan proporsi rata-rata pajak daerah ataupun sektor lainnya. Retribusi daerah menyumbang proporsi rata-rata sebesar 60,40%, Pajak daerah sebesar 33,65%. Laba perusahaan daerah sebesar 1,47% dan lain-lain. Penerimaan

yang sah sebesar 4,48%. Keadaan ini menunjukkan titik berat sumber pendapatan asli daerah pada sektor retribusi daerah, salah satunya adalah retribusi parkir, Lampiran 12.

b. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Ngawi

Besarnya kontribusi yang diberikan oleh retribusi parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah tidak menjamin bahwa pertumbuhan rata-rata dari penerimaan retribusi parkir tersebut akan lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan lain yang memberikan kontribusi lebih rendah. Laju pertumbuhan realisasi retribusi parkir dalam tiap tahunnya sebesar 22,52% per tahun terdapat pada lampiran 5. Dari perhitungan pada lampiran, pertumbuhan per tahun dari penerimaan retribusi parkir tidak selalu sama (berfluktuasi). Fluktuasi tersebut dapat dimaklumi karena jumlah pemakai jasa atau fasilitas yang ada di lokasi parkir tidak selalu tetap setiap tahunnya.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab terjadinya fluktuasi penerimaan retribusi parkir adalah dari jumlah pemakai jasa atau fasilitas yang ada di lokasi parkir dan jenis kendaraan yang di parkir yang berbeda-beda pada setiap tahunnya, serta usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dengan adanya pertumbuhan rata-rata retribusi parkir sebesar 22,52% per tahun diharapkan akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang semakin tinggi, pertumbuhan rata-rata sebesar 22,52% ini apabila dibandingkan dengan pertumbuhan dari sektor retribusi daerah lainnya merupakan pertumbuhan yang dapat dikatakan cukup baik. Sebagai perbandingan dapat dilihat pada tabel 8, yaitu pertumbuhan dari beberapa sumber retribusi daerah di Kabupaten Ngawi yang telah memberikan kontribusi yang ajeg terhadap retribusi daerah. Lampiran 5, 6, 7, 8.

Tabel 8: Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun Empat Sumber Retribusi Daerah di Kabupaten Ngawi (dalam persen)

Jenis Penerimaan Retribusi Daerah	Tahun	Gm (%)	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun (%)
Retribusi RSUD	1995-1999	141,8894	41,8894
Retribusi Parkir	1995-1999	122,5180	22,5180
Retribusi Pasar	1995-1999	110,9941	10,9941
Retribusi Terminal Bus/Taxi	1995-1999	97,0621	0,9706

Sumber data:Lampiran 5, 6, 7, 8

Dari tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi parkir menduduki urutan ke-2 dari 3 sektor lain yang juga merupakan sumber penerimaan retribusi daerah. Pertumbuhan retribusi parkir pada tahun 1996/1997 – 1997/1998 mengalami penurunan, yaitu sebesar 13,49%. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor lain di luar retribusi parkir. Dapat dilihat pada lampiran 10, pada tahun 1996 proporsi retribusi Dispensasi Jalan terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 8,69%, kemudian meningkat menjadi 13,43% pada tahun 1997.

Pada tahun anggaran 1998/1999-1999/2000 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir juga mengalami penurunan yaitu sebesar 05,27%. Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan dari retribusi RSUD yang cukup besar yaitu sebesar 330,99% yaitu dari Rp. 219.760.100 menjadi jumlah Rp. 727.394.121 pada tahun 1999, lampiran 6.

c. Perkembangan Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Ngawi

Analisis ini penting sekali untuk mengetahui perkiraan besarnya penerimaan retribusi parkir di tahun-tahun yang akan datang. Berdasarkan perhitungan penerimaan dari bagian retribusi parkir di Kabupaten Ngawi pada lampiran 9, diperoleh persamaan trend linier sebagai berikut:

$$Y_1 = 89.963.821 + 8.015.178,152 X$$

Persamaan tersebut menunjukkan trend periode dasar adalah sebesar 89.963.821, sedangkan besarnya tambahan trend tiap tahun

adalah sebesar 8.015.178,152. Perbandingan realisasi penerimaan retribusi parkir dengan perhitungan trend linier dapat di ukur pada tabel 9 berikut ini.

Tabel 9: Perbandingan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Ngawi dengan perhitungan Trend Tahun 1995/1996-1999/2000 (dalam rupiah)

Tahun	Penerimaan Retribusi Parkir	Trend Linier
1990/1991	34.983.600	17.827.217,63
1991/1992	36.781.250	33.857.573,94
1992/1993	56.222.080	49.887.930,24
1993/1994	60.547.800	65.918.286,54
1994/1995	66.825.400	81.948.642,85
1995/1996	78.712.100	97.978.999,15
1996/1997	102.944.600	114.009.355,05
1997/1998	116.830.250	130.039.711,08
1998/1999	168.454.090	146.070.068,01
1999/2000	177.337.040	162.100.424,04

Sumber data : Lampiran 9

Pada tabel 9 terlihat realisasi penerimaan retribusi parkir dengan perkiraan mengalami penurunan. Apabila beberapa penerimaan retribusi parkir realisasinya lebih kecil dari perkiraan, ini disebabkan karena adanya kesalahan dalam penarikannya. Untuk memberikan gambaran tentang perkembangan penerimaan retribusi parkir 5 tahun yang akan datang, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut.

$$Y_{2000} = 89.963.821 + 8.015.178,152 \quad (11)$$

$$= 178.130.780,07$$

$$Y_{2001} = 89.963.821 + 8.015.178,152 \quad (13)$$

$$= 194.161.137,00$$

$$Y_{2002} = 89.963.821 + 8.015.178,152 \quad (15)$$

$$= 210.191.493,03$$

$$Y_{2003} = 89.963.821 + 8.015.178,152 \quad (17)$$

$$= 226.221.849,06$$

$$Y_{2004} = 89.963.821 + 8.015.178,152 \quad (19)$$

$$= 242.252.205,09$$

Berdasarkan perhitungan analisis trend sebagaimana lampiran 9, penerimaan retribusi parkir selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, begitu juga perkiraan 5 tahun yang akan datang. Dengan adanya perkiraan ini diharapkan menjadi motivasi bagi pengambil kebijaksanaan dalam menentukan langkah yang akan diambil guna mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

4.2.2 Pembahasan

Penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Ngawi secara sekilas memang cukup baik bila dilihat dari hasil yang diperoleh, namun hal tersebut apabila dicermati masih jauh dari potensi yang ada, tetapi semua itu tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala yang ada memerlukan penyelesaian yang bijaksana dan bertahap sehingga memerlukan waktu yang tidak singkat. Kendala-kendala tersebut dapat timbul disebabkan beberapa hal antara lain: kendala pada intern dinas yang terkait dengan retribusi parkir yaitu Dinas Lalu- lintas dan Angkutan Jalan Daerah dan Dinas Pasar yang memiliki potensi yang lebih besar dalam menyumbang pendapatan asli daerah lewat retribusi parkir yaitu terbatasnya sarana dan prasarana kerja untuk melaksanakan tugas-tugas kantor maupun luar kantor, misalnya kurang tersedianya tempat menyimpan arsip-arsip penting, kendaraan operasional yang terbatas sehingga petugas operasional/pengawas mengalami hambatan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan tugas juru parkir. Di samping itu juga terbatasnya jumlah karyawan, dengan jumlah karyawan yang relatif sedikit maka untuk petugas dinas luar masih belum memenuhi kebutuhan, serta yang tidak kalah penting mutu sumber daya manusia yang ada masih perlu ditingkatkan.

Disamping kendala intern juga ada kendala ekstern yang dihadapi oleh petugas operasional pada DLLAJD dan Dinas Pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh para juru parkir dalam hal penggunaan karcis, dimana karcis yang seharusnya digunakan untuk 1 kali parkir digunakan beberapa

kali. Kendala lain berasal dari wajib bayar, dalam hal ini adalah adalah pengguna jasa parkir, kurang menyadari kewajibannya dalam membayar retribusi parkir dan pentingnya retribusi tersebut bagi pembangunan.

Melihat sangat pentingnya dana retribusi bagi pembangunan yang merupakan sumber pendapatan asli daerah dimana pungutan retribusi harus sesuai dengan *fungsi budgetair* yang murni sebagai imbalan langsung dari pemakai /pemohon jasa pelayanan pemerintah daerah maka biaya untuk memungut dan pengenaan retribusi diusahakan sekecil mungkin sehingga diharapkan dapat menutupi pengeluaran daerah.

Sebagai upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pungutan retribusi parkir di Kabupaten Ngawi dilakukan dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah guna pembiayaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Intensifikasi retribusi dalam arti sempit adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada usaha-usaha mengali lebih dalam obyek-obyek retribusi. Sedangkan yang dimaksud intensifikasi retribusi parkir adalah usaha meningkatkan perolehan retribusi parkir, melalui optimalisasi usaha yang sudah ada, seperti perbaikan sarana dan prasarana, penataan kembali areal parkir, serta peninjauan kembali biaya parkir. Usaha intensifikasi retribusi parkir antara lain adalah melakukan tindakan pungutan yang lebih giat, teliti, teratur, ketat, dan sesuai aturan. Selain itu dilakukan usaha-usaha penggiatan atau penyempurnaan dalam pungutan jasa parkir yang telah disediakan oleh pemerintah daerah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

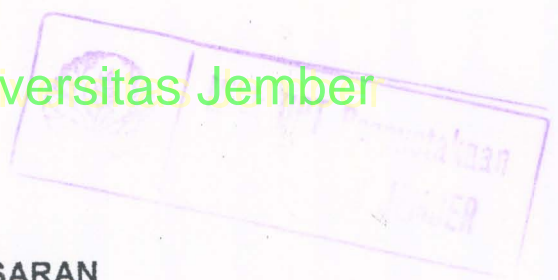
Tujuan intensifikasi retribusi parkir tersebut adalah mencapai tingkat pendapatan tertentu dari retribusi parkir yang dapat dilakukan dengan jalan:

1. penyesuaian tarif pungutan, dengan penetapan tarif yang sesuai dengan kemampuan wajib bayar, hal ini akan memperlancar pemasukan-pemasukan retribusi yang berarti akan dapat memenuhi harapan.
2. penyempurnaan sistem pemungutan dan administrasi.
3. peningkatan personil dan petugas baik untuk dinas maupun juru parkir untuk mengimbangi potensi yang dapat terus dikembangkan sebagai upaya memperbesar pendapatan retribusi pasar dalam menyumbang pendapatan asli daerah.
4. peningkatan pengawasan dan penerangan serta penyuluhan pada masyarakat, serta melaksanakan sanksi yang wajar.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa keberhasilan intensifikasi retribusi parkir tergantung pada usaha pemerintah daerah dan kesadaran para pengguna jasa parkir/wajib bayar yang telah menikmati fasilitas yang telah disediakan pemerintah daerah .

Ekstensifikasi adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada usaha memperluas atau memperbanyak subyek retribusi yang karena belum mengerti atau sengaja tidak mengerti secara administrasi belum dikenakan retribusi. Ekstensifikasi retribusi parkir adalah suatu usaha bagaimana memperoleh atau mendapatkan obyek retribusi baru dari parkir dengan tujuan untuk memperbanyak jumlah pemasukan kas daerah melalui retribusi parkir tersebut. Usaha-usaha ekstensifikasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor permintaan terhadap tempat parkir, sehingga dimungkinkan untuk diadakan perluasan.

Selain usaha intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi parkir, apabila peraturan daerah kurang sesuai dengan keadaan perekonomian sekarang, maka dapat dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan mengenai retribusi parkir.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil bahasan tersebut sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. sumbangan retribusi parkir di Kabupaten Ngawi selama tahun anggaran 1995/1996-1999/2000 mempunyai kontribusi rata-rata sebesar 3,87% per tahun anggaran. Hal ini merupakan proporsi yang dapat dikatakan kecil dibandingkan dengan retribusi lain dalam menyumbang pendapatan asli daerah, diantaranya kontribusi retribusi RSUD dan retribusi pasar daerah yang memiliki proporsi yang relatif besar. Proporsi rata-rata penerimaan retribusi parkir yang kecil ini disebabkan antara lain karena kurangnya mutu pelayanan dan administrasi retribusi parkir yang belum tertib, kurang eratnya hubungan antara pemungut dan pengguna jasa retribusi parkir, kurang ahlinya tenaga pemungut, serta semakin besarnya pendapatan asli daerah tiap tahunnya yang tidak diikuti dengan laju penerimaan retribusi parkir yang tinggi mengakibatkan proporsi kecil. Sebab lainnya adalah adanya penyerahan tugas sebagai Koordinator pemrosesan ijin/ Penyelenggara urusan parkir sehingga proporsi penerimaan retribusi parkir tidak dapat dicapai dengan lebih baik. Namun secara riil penerimaan retribusi parkir meningkat setiap tahunnya dengan perbandingan antara target dan realisasi yang cenderung meningkat.
2. pertumbuhan rata-rata penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Ngawi adalah sebesar 22,52% per tahun. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan dari beberapa sektor retribusi daerah yang lain diantaranya retribusi pasar dan retribusi terminal Bus/Taxi, pertumbuhan penerimaan retribusi parkir cukup besar.
3. perkembangan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan secara riil setiap tahunnya. Perkembangan penerimaan retribusi parkir pada tahun anggaran 2000 diperkirakan

sebesar Rp. 178.130.780,07 Tahun anggaran 2001 diperkirakan sebesar Rp. 194.161.137 dan sampai dengan tahun anggaran 2004 perkembangannya sebesar Rp. 242.252.205,09. Hal ini membuktikan bahwa prospek penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ngawi relatif besar.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, saran-saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah :

1. hendaknya pihak-pihak yang terkait langsung dengan retribusi parkir dalam hal ini adalah DLLAJD dan Dinas Pasar terus berupaya untuk meningkatkan proporsi penerimaan retribusi parkir dengan jalan memperbaiki mutu kerja dan kedisiplinan para pegawai yang ada di DLLAJD dan Dinas Pasar dalam mengelola retribusi parkir serta para juru parkir dalam melakukan pemungutan sehingga diharapkan proporsi penerimaan retribusi parkir yang dicapai dapat lebih besar.
2. perlu adanya kesadaran para pengguna jasa parkir dalam membayar retribusi parkir dan pentingnya retribusi tersebut bagi pembangunan.
3. dalam usaha untuk mencapai pertumbuhan penerimaan retribusi parkir yang lebih tinggi perlu adanya usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi retribusi parkir melalui optimalisasi usaha yang telah ada seperti perbaikan sarana dan prasarana serta peninjauan kembali biaya parkir yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tiap tahunnya.
4. dengan mengetahui perkiraan besarnya penerimaan retribusi parkir di tahun-tahun yang akan datang diharapkan menjadi motivasi bagi pengambil kebijaksanaan dalam menentukan langkah yang akan diambil guna mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, N. 1990. **Hubungan Fiskal antar pemerintah di Indonesia**. Jakarta: LP3ES
- Brotodiharjo, R.S. 1994. **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**. Bandung; PT Eresco
- Dayan, A. 1985. **Pengantar Metode Statistik I**. Jakarta : LP3ES
- Davey. 1989. **Pembiayaan Pemerintah Daerah**. Jakarta: UI-Press
- Departemen Dalam Negeri Direktorat Keuangan Daerah. 1981. **Manual Administrasi Pendapatan Daerah**. Jakarta
- Devas, N. 1988. **Keuangan Pemerintahan Daerah di Indoaesia**. Jakarta: UI-Press
- Dirjen Dikti, P dan K. 1993. **Tap MPR No. II /MPR/1993 Tentang GBHN**, Jakarta: UI-Press
- Djarwanto. 1982. **Statistik Sosial Ekonomi**. Yogyakarta: BPFE-UGM
- Fauzi,A. dan Iskandar.1989. **Cara Membaca APBD**. Malang: Universitas Brawijaya
- Irawan, S. 1990. **Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah**. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Lains, A. 1985. **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Indonesia**. Sinar Harapan. 14 Januari 1985
- Munawir, S.1980. **Pokok-Pokok Perpajakan**. Jakarta: Liberty
- Ningrum, A.W. 1996, **Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Guna Menunjang Pembangunan di Daerah Tingkat II Jombang**. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (tidak dipublikasikan).
- Pamudji. 1980. **Pembinaan Perkotaan di Indonesia**. Jakarta: Liberty
- Soemitro,R. 1987. **Asas dan Dasar Perpajakan**. Jakarta: PT Eresco
- Soetrisno,P. 1986. **Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Daerah**. Yogyakarta: BPFE-UGM

Tjokroamidjojo, B. 1991. **Pengantar Administrasi Negara**. Surabaya:
Erlangga

Wayong, J. 1975, **Administrasi Keuangan Daerah**. Jakarta: Ichtisar



Lampiran 1 :
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran
 1995/1996-1997/1998**

Nomor	Uraian	1995/1996	1996/1997	1997/1998
I.	<u>Atas Dasar Harga Berlaku</u>			
1.	Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)	715499,09	857002,58	971810,69
2.	Penyusutan (Juta Rupiah)	38408,57	41766,30	50911,69
3.	Pajak Tidak Langsung (Juta Rupiah)	5479,10	6002,34	7369,45
4.	Produk Domestik Regional Netto Harga Faktor Produksi (Juta Rupiah)	707611,42	809253,94	913529,73
5.	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Rupiah)	896444,27	1017109,51	1150668,26
6.	Produk Domestik Regional Netto Per Kapita (Rupiah)	844091,78	960417,96	1081660,94
II.	<u>Atas Dasar Harga Konstan 1993</u>			
1.	Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)	637721,27	681733,43	708757,44
2.	Penyusutan (Juta Rupiah)	33467,57	35092,49	36213,08
3.	Pajak Tidak Langsung (Juta Rupiah)	4180,60	4790,72	5024,58
4.	Produk Domestik Regional Netto Harga Faktor Produksi (Juta Rupiah)	600073,09	641880,22	667519,06
5.	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Rupiah)	760721,58	809077,35	839201,02
6.	Produk Domestik Regional Netto Per Kapita (Rupiah)	715812,03	761779,79	790373,07
III.	Jumlah Penduduk (Pertengahan Tahun)	838311	842606	844562

Sumber data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi, Maret 2001

Lampiran 2 :
Jenis Jenis Retribusi Daerah di Kabupaten Ngawi serta Perubahan Retribusi Daerah sebagai dampak diberlakukannya Undang-Undang No. 18 / 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Jenis-Jenis Retribusi Daerah
di Kab. Ngawi yang didukung Perda
 Ketentuan UUNo. 18/1997
Ttg. Pajak Daerah & Retribusi Daerah
KETERANGAN

1. Retribusi leges	Dihapus	Rencana digabung dengan Retribusi lain (Tarifnya)
2. Retribusi Dispensasi Jalan	Dihapus	
3. Retribusi Parkir	Diganti	Retribusi Parkir di Jalan Umum & Ret. Tempat Khusus Parkir
4. Retribusi Seberangan	Tetap Berlaku	Retribusi Penyeberangan diatas Air
5. Retribusi Pembantaian	Diganti	Retribusi Rumah Potong Hewan
6. Retribusi Sewa Tanah/Bangunan	Dihapus	Digabung Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
7. Retribusi IMB	Tetap Berlaku	Retribusi IMB
8. Retribusi Pemakaian Tanah	Dihapus	Digabung Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
9. Retribusi Pekuburan	Tetap Berlaku	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pembakaran Mayat
10. Retribusi Terminal Bus/Taxi	Tetap Berlaku	Retribusi Terminal
11. Retribusi RSUD	Diganti	Retribusi Pelayanan Kesehatan
12. Retribusi Tempat Rekreasi	Diganti	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
13. Retribusi Pasar	Tetap Berlaku	Retribusi Pasar
14. Retr. Daft. Ulang Ijin Usaha	Dihapus	Dihapus
15. Retribusi Kartu Ternak	Dihapus	Dihapus
16. Retribusi Ijin Trayek Kend. Bermotor	Dihapus	Digabung Retribusi Pasar
17. Retribusi Pasar Hewan	Dihapus	Digabung Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
18. Retribusi Sewa Ambulance	Dihapus	Digabung Retribusi Pelayanan Kesehatan
19. Retribusi Obat Inpres	Dihapus	Dihapus
20. Retribusi Kendaraan Tak Bermotor	Dihapus	Dihapus
21. Retribusi Penggilingan Padi	Diganti	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
22. Retribusi Sampah	Dihapus	Diganti Retribusi Ijin Trayek
23. Retribusi Ijin Usaha Angkutan	Dihapus	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
24. Retribusi Sewa Gedung	Dihapus	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
25. Retribusi Sewa Kios	Dihapus	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
26. Retribusi Sewa Wales	Diganti	Retr. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
27. Retribusi Pendaftaran KTP	Dihapus	Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah
28. Retribusi Ongkos Cetak	Dihapus	Digabung Retribusi Pelayanan Kesehatan
29. Bagian dari Husada Bhakti	Dihapus	Digabung Retribusi Pelayanan Kesehatan
30. Pemeriksaan Kesehatan Mempelai	Dihapus	Digabung Retribusi Pelayanan Kesehatan
31. Ret. Pemeriksaan Kesehatan Ternak	Dihapus	Digabung Retribusi Rumah Potong Hewan
32. Retribusi Penggunaan alat Laborat	Dihapus	Digabung Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
33. Retribusi Ternak Pemerintah Daerah	Dihapus	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi, Maret 2001

**Lampiran 3 :
Jumlah dan Klasifikasi Lokasi Parkir di Kabupaten Ngawi Berdasarkan
Yang Mengeloa**

I. Dinas Pasar Kabupaten Ngawi

1. Pasar Ngawi
2. Pasar Beran
3. Pasar Paron
4. Pasar Ngale
5. Pasar Karangjati
6. Pasar Padas
7. Pasar Kedungprahu
8. Pasar Mluwur
9. Pasar Ngrambe
10. Pasar Kedunggalar
11. Pasar Walikukun
12. Pasar Hewan Ngawi

**II. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah (DLLAJD) Kabupaten
Ngawi**

1. Parkir Dinas Jln. Sultan Agung
 - a. Toko 55
 - b. Toko Semar
 - c. Toko Irian
 - d. Toko Chandra
 - e. Toko Timur Jaya (Sore)
2. Terminal
 - a. Terminal Gendingan
 - b. Sub Terminal Ngramb
 - c. Sub Terminal Sidowayah
 - d. Sub Terminal Karangjati
 - e. Sub Terminal Sine
 - f. Land. Angkota/Angdes Kaliloro
3. Borongan Dalam Kota
 - a. Toko Accord
 - b. Toko Ramai
 - c. Jln. Mangkubumi
 - d. Toko Karunia
 - e. Toko Wawa
 - f. Toko Semar
 - g. Jln. PB. Sudirman, Dungus, Paron
 - h. Jln. Dr. Rajiman
 - i. Toko Irian
4. Luar Kota
 - a. Kendal
 - b. Jogorogo
 - c. Walikukun
 - d. Kedunggalar
 - e. Mantingan
 - f. Karangjati
 - g. Sembung
5. PO. GM dan Andy,s Kencana
 - a. PO. Gunung Mas
 - b. PO. Andy,s Kencana
 - c. PO. Langganan

**Sumber Data : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dan Dinas
Pasar Kabupaten Ngawi, Maret 2001**

Lampiran 4 :
Perhitungan Proporsi Penerimaan Retribusi Parkir Kabupaten Ngawi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000 (dalam persen)

Tahun Anggaran	Jumlah Penerimaan Retribusi Parkir = Y_1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah = X_1	Proporsi (%)
1995/1996	78.712.100	2.770.747.489,55	2,84
1996/1997	102.944.600	2.807.893.111,39	3,67
1997/1998	116.830.250	3.429.841.254,50	3,41
1998/1999	168.454.090	3.639.549.142,70	4,63
1999/2000	177.337.040	3.690.346.351,00	4,81
Proporsi rata-rata			3,87

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi, Maret 2001

Perhitungan:

$$P_i = \frac{Y_1}{X_1} \times 100\%$$

1. T.A. 1995/1996 = $\frac{78.712.100}{2.770.747.489,55} \times 100\%$
= **2,84 %**
2. T.A. 1996/1997 = $\frac{102.944.600}{2.807.893.111,39} \times 100\%$
= **3,67 %**
3. T.A. 1997/1998 = $\frac{116.830.250}{3.429.841.254,50} \times 100\%$
= **3,41 %**
4. T.A. 1998/1999 = $\frac{168.454.090}{3.639.549.142,70} \times 100\%$
= **4,63 %**
5. T.A. 1999/2000 = $\frac{177.337.040}{3.690.346.351,00} \times 100\%$
= **4,81 %**

Lampiran 5 :
 Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun Retribusi Parkir di Kabupaten
 Ngawi Tahun Anggaran 1995/1996-1999/2000 (dalam persen)

Tahun Anggaran	Retribusi Parkir	Z _i (%)	Log Z _i	Pertumbuhan/ Tahun (%)
1995/1996	78.712.100	130.7862	2,1166	30,78
1996/1997	102.944.600	113,4885	2,0550	13,49
1997/1998	116.830.250	144,1870	2,1589	44,19
1998/1999	168.454.090	105.2732	2,0223	05,27
1999/2000	177.337.040			

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi, Maret 2001

Pertumbuhan rata-rata per tahun :

$$\text{Log } G_m = \frac{\sum_{i=1}^n \log Z_i}{n} = \frac{8,3528}{4} = 2,0882$$

$G_m = 122,5180$, Jadi pertumbuhan rata-rata per tahun retribusi parkir adalah **22,5180%**.

Lampiran 6 :
 Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun Retribusi R S U D di Kabupaten
 Ngawi Tahun Anggaran 1995/1996-1999/2000 (dalam persen)

Tahun Anggaran	Retribusi R S U D	Z_i (%)	Log Z_i
1995/1996	179.476.950	95,3174	1,9792
1996/1997	171.072.850	105.6354	2,0238
1997/1998	180.713.550	121,6069	2,0850
1998/1999	219.760.100	330,9946	2,5198
1999/2000	727.394.121		

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi, Maret 2001

Pertumbuhan rata-rata per tahun :

$$\text{Log } G_m = \frac{\sum_{i=1}^n \log Z_i}{n} = \frac{8,6078}{4} = 2,15195$$

$G_m = 141,8894$, Jadi pertumbuhan rata-rata per tahun retribusi R S U D adalah **41,8894 %**.

Lampiran 7 :
 Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun Retribusi Pasar di Kabupaten
 Ngawi Tahun Anggaran 1995/1996-1999/2000 (dalam persen)

Tahun Anggaran	Retribusi Pasar	Z _i (%)	Log Z _i
1995/1996	306.657.773	107.5213	2.0315
1996/1997	329.722.400	102.5201	2,0108
1997/1998	338.031.700	109.5118	2,0395
1998/1999	370.184.750	125,7358	2,0995
1999/2000	465.454.850		

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi, Maret 2001

Pertumbuhan rata-rata per tahun :

$$\text{Log } G_m = \frac{\sum_{i=1}^n \log Z_i}{n} = \frac{8,1813}{4} = 2,0453$$

$G_m = 110,9941$, Jadi pertumbuhan rata-rata per tahun retribusi pasar adalah **10,9941 %**.

Lampiran 8 :

Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun Retribusi Terminal Bus/Taxi di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 1995/1996-1999/2000 (dalam persen)

Tahun Anggaran	Retribusi Terminal Bus/Taxi	Z_i (%)	Log Z_i
1995/1996	108.131.500	108.5450	2.0356
1996/1997	117.371.300	107.2642	2,0305
1997/1998	125.897.400	86.4905	1.9370
1998/1999	108.889.300	88.1169	1.9451
1999/2000	95.949.900		

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi, Maret 2001

Pertumbuhan rata-rata per tahun :

$$\text{Log } G_m = \frac{\sum_{i=1}^n \log Z_i}{n} = \frac{7.9482}{4} = 1.98705$$

$G_m = 97.0622$, Jadi pertumbuhan rata-rata per tahun retribusi Terminal Bus/Taxi adalah **0.9706 %**.

Lampiran 9 :
Perhitungan Trend Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Ngawi
Tahun 2000-2004 (dalam persen)

Tahun	Y	X	XY	X ²	Y _i
1990/1991	34.983.600	-9	-314.852.400	81	17.827.217,63
1991/1992	36.781.250	-7	-257.468.750	49	33.857.573,94
1992/1993	56.222.080	-5	-281.110.400	25	49.887.930,24
1993/1994	60.547.800	-3	-181.643.400	9	65.918.286,54
1994/1995	66.825.400	-1	-66.825.400	1	81.948.642,85
1995/1996	78.712.100	1	78.712.100	1	97.978.999,15
1996/1997	102.944.600	3	308.833.800	9	114.009.355,05
1997/1998	116.830.250	5	584.151.250	25	130.039.711,08
1998/1999	168.454.090	7	1.179.178.630	49	146.070.068,01
1999/2000	177.337.040	9	1.596.033.360	81	162.100.424,04
Total	899.638.210	0	2.645.008.790	330	

Sumber Data: Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Ngawi, Maret 2001

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{899.638.210}{10} = 89.963.821$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{2.645.008.790}{330} = 8.015.178,152$$

$$Y_i = a + b X$$

$$Y_{2000} = 89.963.821 + 8.015.178,152 \quad (11)$$

$$= 178.130.780,07$$

$$Y_{2001} = 89.963.821 + 8.015.178,152 \quad (13)$$

$$= 194.161.137,00$$

$$Y_{2002} = 89.963.821 + 8.015.178,152 \quad (15)$$

$$= 210.191.493,03$$

$$Y_{2003} = 89.963.821 + 8.015.178,152 \quad (17)$$

$$= 226.221.849,06$$

$$Y_{2004} = 89.963.821 + 8.015.178,152 \quad (19)$$

$$= 242.252.205,09$$

Lampiran 10 :
Proporsi Jenis-Jenis Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Ngawi (dalam persen)

No.	Jenis-Jenis Retribusi Daerah	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999
1.	Uang Leges	2,5195	1,4087	1,0219	0,1257
2.	Dispensasi Jalan	2,6263	14,5121	21,2477	2,2813
3.	Retribusi Parkir	4,3527	6,1214	5,3888	7,8456
4.	Seberangan	0,4660	0,4660	0,3846	0,5740
5.	Pembanteian	0,4632	0,5007	0,4111	0,3512
6.	Sewa Tanah / Bangunan	0,5391	0,6514	0,5429	0,8130
7.	Sempadan / Ijin Bangunan	2,6208	2,6461	2,0302	1,4354
8.	Pemakaian Tanah	0,1695	0,1723	0,1416	0,0254
9.	Pekuburan	0,0038	0,0089	0,0074	0,0070
10.	Terminal Bus / Taxi	5,9796	6,9793	5,8070	5,0714
11.	R S U D	9,9249	10,1726	8,3354	10,2351
12.	Tempat Rekreasi	0,1908	0,1836	0,1684	0,4762
13.	Pasar Daerah	16,9578	19,6064	15,5917	17,2410
14.	Daft. Ulang Ijin Usaha	0	0	0,1726	0,2063
15.	Kartu Ternak	0,9857	1,6083	1,4855	0,2623
16.	Ijin Trayek Kend. Bermotor	0	0	0,4031	1,0732
17.	Pasar Hewan	3,5278	4,1714	3,3932	3,5184
18.	Sewa Ambulance	0,4951	0,4778	0,2997	0,1801
19.	Obat Inpres	3,1533	3,8679	3,2296	6,2614
20.	Kendaraan tak Bermotor	0	0	0,0221	0,0222
21.	Periggilingan Padi	0,5804	0,7598	0,6060	0
22.	Sampah	10,4129	14,8759	13,0166	3,3984
23.	Ijin Usaha Angkutan	0,0174	0,0717	0,3337	3,3984
24.	Sewa Gedung	0,4064	0,7409	5,6849	0,2748
25.	Sewa Kios	2,1957	2,4060	1,9007	2,2434
26.	Sewa Wales	2,6499	3,0536	1,3455	0,6866
27.	Pendaftaran KTP	26,6509	2,1240	0,4741	28,1038
28.	Ongkos Cetak Pasar Desa	0,1769	0,2750	0,2562	0,3441
29.	Bag. dari HUSADA BHAKTI	1,9336	1,6639	1,6414	1,3792
30.	Pemeriksaan Kes. Mempelai	0	0,4943	0,6022	0,6571
31.	Pemeriksaan Kes.Ternak	0	0	0,7695	0,3696
32.	Penggunaan Alat / Lab	0	0	0,0560	0,0969
33.	Ternak Pemerint. Daerah	0	0	3,2287	4,4245
	Jumlah	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi, Maret 2001
 (data diolah)

Lampiran 11 :

Proporsi Jenis-Jenis Retribusi Daerah Terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun 1999/2000 Sebagai Dampak Diberlakukannya UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No.	Jenis-Jenis Retribusi Daerah	1999 / 2000
1.	Pelayanan Kesehatan	36,0651
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,2481
3.	Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	4,5475
4.	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,0074
5.	Parkir di Tepi Jalan Umum	6,4992
6.	Pasar	23,0778
7.	Pemakaian Kekayaan Daerah	6,9888
8.	Terminal	4,7573
9.	Pempat Khusus Parkir	2,2934
10.	Rumah Potong Hewan	1,4281
11.	Tempat Rekreasi dan Olah Raga	0,6701
12.	Penyeberangan di Atas Air	0,6484
13.	Penjualan Produksi Usaha Daerah	9,4752
14.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	1,9446
15.	Ijin Gangguan	0,3106
16.	Ijin Trayek	1,0384
J u m l a h		100

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi, Maret 2001
(data diolah)

Lampiran 12 :
Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Daerah dan Lain-lain Usaha Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 1995/1996-1999/2000 (dalam persen)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Proporsi (%)	Retribusi Daerah	Proporsi (%)	Laba Perusahaan Daerah	Proporsi (%)	Lain-Lain Penerimaan Yang Sah	Proporsi (%)
1995/1996	2.770.747.489,55	699.886.592	25,26	1.808.355.037	65,27	47.672.301,66	1,72	214.833.522,89	7,75
1996/1997	2.807.893.111,39	934.715.297	33,29	1.681.708.650	59,90	53.207.511,11	1,89	138.261.653,28	4,92
1997/1998	3.429.841.254,50	1.091.566.929	31,83	2.168.023.205	63,21	61.200.390,41	1,78	109.050.730,09	3,81
1998/1999	3.639.549.142,70	1.279.241.498	35,15	2.147.124.325	58,99	71.762.372,50	1,97	141.420.947,20	3,89
1999/2000	3.690.346.351,00	1.575.726.538	42,70	2.016.892.821	54,65	-	-	97.726.992,00	2,65
Proporsi rata-rata			33,65		60,40		1,47		4,48

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi, Maret 2001 (data diolah)

Lampiran 13 :
Proporsi Penerimaan Retribusi Daerah, Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000 (dalam persen)

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Daerah	Proporsi (%)	Retribusi Parkir	Proporsi (%)
1995/1996	2.770.747.489,55	1.808.355.073	65,27	78.712.100	2,84
1996/1997	2.807.893.111,39	1.681.708.650	59,90	102.994.600	3,67
1997/1998	3.429.481.254,50	2.168.023.205	63,21	116.830.250	3,41
1998/1999	3.639.549.142,70	2.147.124.325	58,99	168.454.090	4,63
1999/2000	3.690.346.351,00	2.016.892.821	54,65	177.337.040	4,87
Proporsi rata-rata			60,40		3,87

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi, Maret 2001 (data diolah)